

IMPLEMENTASI SURAT EDARAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BLORA NOMOR 443.2/ 1156 TAHUN 2020
TENTANG LAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
DALAM RANGKA PENCEGAHAN PENULARAN DAN PENYEBARAN
INFEKSI CORONA VIRUS DISEASE-19 DI JAWA TENGAH
PADA SMP NEGERI 2 JEPON

Oleh

Suparjo

Program Studi S2 Magister Administrasi Publik Universitas Slamet Riyadi
Surakarta

Email: masjo2jepon@gmail.com

Abstract

The implementation circular letter from the head of the Blora district office regarding Education Delivery Services in the Context of Preventing the Transmission and Spread of Corona Virus Disease (Covid-19) infection in Central Java at SMP N 2 Jepon. The results of the study indicate that there is communication, resources, disposition and bureaucratic structure in implementing circular letter from the head of the Blora district office regarding Education Delivery Services in the Context of Preventing the Transmission and Spread of Corona disease (COVID-19) infection in Central Java at SMP N 2 Jepon through long distance learning. In learning activities there are several obstacles, including geographical location, costs, infrastructure, bored students and the characteristics of students who are more interested in playing games. The school has made improvements in learning through socialization, interesting learning, internet quotas for learning and providing learning motivation. The conclusion of the implementation of the circular letter of the Head of the Blora Regency Education Office Number 443.2/1156 of 2020 at SMP Negeri 2 has not run optimally, because there are still some children's rights that are not fulfilled.

Keywords: *Communication, resources, disposition and bureaucratic structure .*

Pendahuluan

Pendidikan memiliki peran untuk menyiapkan generasi yang berkualitas untuk kepentingan masa depan. Melalui pendidikan akan menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, terampil, dan terasah untuk menghadapi berbagai tantangan zaman yang akan datang. Setiap warganegara berhak mendapatkan akses untuk mengikuti pendidikan formal,

informal maupun nonformal dan pemerintah sebagai implementor kebijakan dalam bidang pendidikan berkewajiban memfasilitasinya.

Pandemi virus corona disease (COVID) 19 di Indonesia mengakibatkan aktivitas belajar mengajar tatap muka di sekolah dihentikan. Tidak ingin penularan virus corona disease (COVID) 19 semakin meluas, pemerintah pada Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan memutuskan untuk mengubah ruang belajar ke dunia maya. Program itu bernama Pembelajaran Jarak Jauh. Untuk menanggulangi wabah pandemi virus corona disease (COVID)19 semua negara melakukan sebuah tindakan salah satunya dengan melakukan gerakan social distancing yaitu jarak sosial yang telah digunakan untuk meminimalisir terjadinya hubungan dalam jumlah yang lebih banyak 1 .

Begitu juga di SMP N 2 Jepon mentaati kebijakan dari kepala dinas kabupaten Blora tentang Layanan Penyelenggaraan Pendidikan Dalam Rangka Pencegahan Penularan dan Penyebaran Infeksi virus corona disease (COVID-19) di Jawa Tengah telah mengalami pembelajaran jarak jauh. Peserta didik menggunakan Hp dan jaringan internet untuk memperoleh materi pembelajaran dari guru di sekolah. Berdasarkan kebijakan pembelajaran jarak jauh seorang guru tetaplah harus memperhatikan keberhasilan dari pembelajaran dan dampak yang ditimbulkan dari kegiatan pembelajaran jarak jauh ini.

SMP N 2 Jepon telah mengimplementasikan pembelajaran jarak jauh karena selain untuk mengurangi penyebaran virus, pembelajaran harus tetap dilaksanakan agar peserta didik tetap dapat memperoleh materi pelajaran selagi masa pandemi tengah berlangsung. Pembelajaran jarak jauh di SMP N 2 Jepon meliputi pembelajaran Daring dan Luring. Pembelajaran jarak jauh ini di terapkan di SMP N 2 Jepon mulai bulan Maret 2020 sampai sekarang. Untuk tingkat partisipasi siswa dalam

pembelajarannya hanya mencakup 60 % saja.

Keunggulan pembelajaran jarak jauh terbuka memungkinkan lebih banyak fleksibilitas, pembelajaran jarak jauh cenderung lebih murah, peserta didik dapat mengontrol kapan mereka belajar pada peserta didik. Sedangkan kelemahannya disiplin dapat menjadi masalah bagi pendidik saat melakukan pembelajaran jarak jauh, minimnya kontak langsung antara pengajar dan peserta didik memperlambat proses terbangunnya relasi sosial dan nilai-nilai yang menjadi tujuan dasar dari pendidikan, Keterbatasan teknologi komunikasi dan informasi.

Menurut Dye dalam Winarno mendefinisikan kebijakan publik sebagai “whatever government choose to do or not to do” yang dalam bahasa Indonesia berarti apapun juga yang dipilih pemerintah, baik yang akan dikerjakan ataupun tidak dikerjakan (mendamkan), sedangkan Robert Eyestone mengatakan secara luas bahwa kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkungannya (Winarno, 2007:17). Sedangkan menurut Chiff J.O Udaji dalam Abdul Wahab (2001:5) mendefinisikan kebijakan publik atau kebijakan Negara sebagai “An sanctioned course of action addressed to particular problem or group of related problems that affect society at large” (Suatu tindakan bersangsi yang mengarah pada suatu masalah atau sekelompok masalah tertentu yang saling berkaitan mempengaruhi sebagian besar masyarakat).

Proses analisis kebijakan publik adalah serangkaian aktivitas intelektual yang dilakukan di dalam proses kegiatan yang bersifat politis. Aktivitas politis tersebut nampak dalam serangkaian kegiatan yang mencakup penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian kebijakan. Sedangkan aktivitas perumusan masalah, forecasting, rekomendasi kebijakan, monitoring, dan evaluasi kebijakan.

Studi implementasi kebijakan merupakan studi dari banyak cabang ilmu pengetahuan yang saling berkontribusi. Studi implementasi kebijakan dapat dipahami sebagai suatu ilmu administrasi negara yang tidak banyak berhubungan dengan ilmu politik. Pengaruh banyaknya cabang ilmu pengetahuan yang berkontribusi membawa dampak pada proses implikasi kebijakan. Pada proses implikasi kebijakan sering dijumpai masalah-masalah yang secara tiba-tiba muncul ketika di lapangan dan tidak terdapat dalam konsep yang telah dibuat. Oleh sebab itu dibutuhkan sebuah konsistensi implementasi kebijakan dengan menganut pada teori implementasi kebijakan yang relevan dengan suatu kebijakan yang akan diimplementasikan.

Implementasi kebijakan menurut Teori Edward harus memperhatikan empat isu pokok, yaitu: (1) komunikasi, (2) ketersediaan sumberdaya, (3) disposisi, (4) struktur organisasi yang jelas.

A) Faktor Komunikasi

Faktor ini dimaksudkan untuk melihat sejauh mana pihak-pihak yang terlibat atau yang bertanggungjawab dalam mengimplementasikan kebijakan memahami atau mengetahui apa yang akan atau yang perlu dikerjakannya. Oleh karena itu, pemerintah harus melakukan komunikasi kebijakan dengan memerhatikan:

- a) Transmisi, yang berkenaan bagaimana proses penyampaian informasi kebijakan, sehingga para pelaksana mengetahui kebijakan tersebut;
- b) Kejelasan, yang berkenaan dengan pemahaman para pelaksana tentang isi kebijakan tersebut;
- c) Konsistensi, berkenaan dengan aturan implementasi yang konsisten dan tidak berubah-ubah sehingga tidak membingungkan para pelaksana.

B) Faktor Sumber Daya

Agar implementasi kebijakan berjalan sebagaimana mestinya, para pelaksana harus didukung dengan sumber daya yang memadai. Sumber daya yang penting dalam implementasi kebijakan meliputi:

- a) Staf pelaksana, jumlah yang memadai, berpengalaman, dan terampil pada bidangnya masing masing unit dalam hal menangani masalah media tradisional adalah Bidang Diseminasi Informasi (Dinas Pendidikan /Kabupaten/Kota);
- b) Informasi berupa data-data yang telah diformulasikan

dalam bentuk yang dapat dimengerti oleh para pelaksana kebijakan.

- c) Kewenangan dalam berbagai bentuk mulai dari perintah sampai pada menghilangkan perilaku yang menghalangi implementasi kebijakan;
- d) Fasilitas yang diperlukan dalam mengimplementasikan kebijakan, berupa fasilitas kantor, alat-alat penyimpan data/Perlengkapan media tradisional, gedung kantor, kendaraan, dan lain sebagainya.

C) Faktor Disposisi atau Sikap Pelaksana terhadap Kebijakan

Faktor ini berkaitan dengan ketanggapan yang dimanifestasikan sebagai sikap dan perilaku warga sekolah terhadap kebijakan Dinas Pendidikan, yang dilihat dari tiga aspek, yaitu:

- a) Efek disposisi, berupa kepatuhan para pelaksana dalam mengimplementasikan kebijakan;
- b) Staffing birokrasi, berkenaan dengan pengangkatan para pelaksana dalam posisi-posisi yang menentukan pembagian yang disesuaikan dengan tugas personil;
- c) Insentif berupa penghargaan yang diberikan kepada pelaksana di lapangan.

D) Struktur birokrasi

Struktur birokrasi setingkat Dinas merupakan bagian tugas dalam membantu wilayah pemerintahan di daerah, hal ini sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi

kebijakan Dinas Pendidikan kabupaten Blora,. Oleh karena itu, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Prosedur Operasional Baku (Standard Operational Procedures-SOP), sebagai tuntunan internal dari implementasi suatu kebijakan yang seragam;
- b) Fragmentasi merupakan pembagian tanggung jawab untuk sebuah bidang kebijakan di antara unit-unit organisasional yang tersebar luas. Fragmentasi perlu memerhatikan sifat dari kebijakan yang ingin diimplementasikan, dan penyebaran tanggung jawab kepada seluruh pelaksana kebijakan.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif yaitu rangkaian kegiatan untuk memperoleh data yang bersifat apa adanya tanpa ada dalam kondisi tertentu yang hasilnya lebih menekankan makna. Penelitian ini dilakukan di SMP Negeri 2 Jepon Kecamatan Jepon kabupaten Blora. Subyek penelitian ini adalah siswa SMP N 2 Jepon kecamatan Jepon kabupaten Blora yang merupakan informan utama. Sebagai triangulasi, peneliti memanfaatkan Kepala Sekolah SMP N 2 Jepon, guru Bimbingan Konseling, dan guru Mata Pelajaran. Data yang di peroleh dengan menggunakan purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik pengambilan data dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono,

2012: 218). Pengumpulan data penelitian dilakukan dengan teknik wawancara langsung, *face – to – face interview*. Teknik analisis data berupa reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Implementasi Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blora Nomor 443.2/1156 tahun 2020 tentang Layanan Penyelenggaraan Pendidikan Dalam Rangka Pencegahan Penularan dan Penyebaran Infeksi Covid-19 di Jawa Tengah pada SMP Negeri 2 Jepon

Pandemi covid 19 telah mengubah tatanan kehidupan masyarakat di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Sejak wabah Corona virus menghantam Indonesia, pemerintah memberlakukan berbagai peraturan ketat untuk mencegah penularan yang lebih meluas lagi. Salah satunya kebijakan bagi dunia pendidikan yakni pembelajaran jarak jauh. Pembelajaran jarak jauh ini merupakan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, khususnya Kemendikbud dan Kemenristek/BRIN, untuk mencegah penyebaran covid 19 di sekolah dan kampus.

Kebijakan merupakan kumpulan keputusan yang di ambil seseorang/badan/lembaga yang pada umumnya memegang kekuasaan untuk mengatasi masalah-masalah atau tujuan tertentu, terutama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Publik, artinya hal yang berkenan dengan masyarakat luas atau umum. Kebijakan publik pada dasarnya adalah kebijakan yang dinyatakan, dikeluarkan, dilakukan ataupun yang tidak dilakukan oleh

pemerintah yang memuat program dan kegiatan yang di jalankan (Dadang Sufianto, 2015)

Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blora Nomor 443.2/1156 tahun 2020 tentang Layanan Penyelenggaraan Pendidikan Dalam Rangka Pencegahan Penularan dan Penyebaran Infeksi Covid-19 di Jawa Tengah pada SMP Negeri 2 Jepon. Berdasarkan hasil temuan peneliti diperoleh perencanaan kegiatan pembelajaran jarak jauh digunakan SMP N 2 Jepon untuk menghadapi pembelajaran di tengah-tengah pandemi covid-19 yang sedang berlangsung.

Fungsi Pembelajaran jarak jauh pada umumnya untuk memberikan akses pendidikan, mutu pendidikan, efisiensi sarana dan prasarana pendidikan, peningkatan SDM bermutu, efisiensi biaya (penyelenggara dan peserta didik) (setijadi, 2005: 8 – 13). Hal itu memperlihatkan Pembelajaran jarak jauh memberikan peluang kepada peserta didik untuk belajar luwes dengan kemudahan akses dalam proses pembelajaran, mutu pendidikan tetap terjamin dengan proses perencanaan dan pengorganisasian pembelajaran secara sistematis, penggunaan sarana, prasarana dan biaya yang efisien, dan proses pembelajaran mendapatkan peserta didik yang berkualitas.

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan dalam melihat implementasi Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blora Nomor 443.2/1156 tahun 2020 tentang Layanan Penyelenggaraan Pendidikan Dalam Rangka Pencegahan Penularan dan

Penyebaran Infeksi Covid-19 di Jawa Tengah pada SMP Negeri 2 Jepon adalah teori yang disampaikan oleh George C. Edwards. Menurut Edwards III ada empat faktor yang mempengaruhi kebijakan publik yaitu faktor komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Pengaruh keempat faktor ini pada Implementasi Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blera Nomor 443.2/1156 tahun 2020 tentang Layanan Penyelenggaraan Pendidikan Dalam Rangka Pencegahan Penularan dan Penyebaran Infeksi Covid-19 di Jawa Tengah pada SMP Negeri 2 Jepon adalah sebagai berikut:

1) Komunikasi

Komunikasi Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blera Nomor 443.2/1156 tahun 2020 tentang Layanan Penyelenggaraan Pendidikan Dalam Rangka Pencegahan Penularan dan Penyebaran Infeksi Covid-19 di Jawa Tengah pada SMP Negeri 2 Jepon merupakan penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan dan diefektifkan lagi dengan disampaikan juga kepada kelompok sasaran kebijakan serta pihak lain yang berkepentingan. Indikator dalam komunikasi yaitu proses transmisi/penyaluran komunikasi, kejelasan komunikasi dan konsistensi. Aspek dari komunikasi ini berupa keputusan-keputusan kebijakan pembelajaran jarak jauh, petunjuk pelaksanaan, perintah dan lain-lain. Sehingga komunikasi yang terjadi berupa komunikasi internal dan komunikasi eksternal. Komunikasi internal terjadi antar

pejabat Dinas Pendidikan yaitu pejabat struktural Dinas Pendidikan Kota Blera dengan Pejabat Unit Pelaksana Teknis (UPT) berupa sekolah. Di SMP N 2 Jepon telah terjadi penyampaian komunikasi dari kepala sekolah kepada semua pegawai dengan baik. Dalam komunikasi ini bertujuan agar mereka mengetahui keadaan lapangan yang sesungguhnya, apa yang harus dipersiapkan dan dilaksanakan guna tujuan kebijakan pembelajaran jarak jauh agar dapat tercapai dan terwujud.

Indikator selanjutnya adalah kejelasan komunikasi, kejelasan informasi merupakan hal yang penting karena dengan adanya kejelasan komunikasi diharapkan tidak terjadi perbedaan persepsi antara pembuat kebijakan, pelaksana dan masyarakat. Dari hasil wawancara dengan kepala sekolah menyebutkan bahwa kejelasan informasi yang dilakukan oleh sekolah sudah baik, hal ini dapat terlihat dari sosialisasi yang jelas dan sudah tahunya peserta didik mengenai kebijakan pembelajaran jarak jauh yang meliputi daring dan luring tersebut.

Indikator selanjutnya dalam komunikasi yaitu konsistensi. Konsistensi diperlukan agar kebijakan yang diambil tidak simpang siur sehingga membingungkan pelaksana kebijakan, target group dan pihak-pihak yang berkepentingan. Perintah kepala sekolah kepada bapak ibu guru dan tenaga kependidikan yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi telah konsisten dan jelas, jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan.

2) Sumber Daya

Sumber daya dipilih sebagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan karena implementasi kebijakan memerlukan dukungan sumber daya manusia maupun sumber anggaran/ finansial untuk melaksanakan implementasi kebijakan tersebut

a) Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai di SMP N 2 Jepon berjumlah 31 orang, yang terdiri dari 1 kepala sekolah, 2 guru bimbingan konseling, 18 guru mata pelajaran dan 9 staf yang terjun ke lapangan. Sumber daya pegawai SMP N 2 Jepon telah memadai dan mumpuni, karena dalam pelaksanaan pembelajaran jarak jauh ini telah diadakan pendidikan dan pelatihan.

b) Sumber Daya Anggaran

Sumber Daya Anggaran selain mengandalkan dari pemerintah berupa pemberian kuota data untuk guru dan peserta. Untuk itu SMP N 2 Jepon yang khususnya menangani pembelajaran jarak jauh ada langkah pemberian kuota data sebesar Rp 50.000 kepada bapak ibu guru. Dalam pembelajaran jarak jauh yang berlangsung lama tidak cukup pemberian kuota tersebut. Hal inilah yang menyulitkan pembelajaran jarak jauh pembelajaran berlangsung secara optimal.

3) Disposisi (Sikap Pelaksana)

Menurut Edward III dalam Widodo (2010:104) disposisi merupakan kemauan, keinginan dan kecenderungan para pelaku untuk

melaksanakan kebijakan tadi secara sungguh sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan. Indikator disposisi dalam implementasi terdiri dari:

a) Tingkat kepatuhan bapak ibu guru dan karyawan dalam pelaksanaan pembelajaran jarak jauh mencapai 100 %. Disini bapak ibu sadar akan kesehatan warga sekolah semua. Tingkat kepatuhan peserta didik mencapai 90 % saja. Waktu berangkat sekolah peserta didik taat sekali, tetapi pada waktu pulangya terkadang timbul kerumunan.

b) pemilihan guru di SMP N 2 Jepon untuk melaksanakan pembelajaran jarak jauh, bagi guru yang belum memiliki kemampuan IT akan diadakan pelatihan terlebih dahulu. Secara umum guru sudah siap untuk pelaksanaan Pembelajaran jarak jauh.

b) Insentif Pendapat George C. Edward III, insentif merupakan salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah sikap para pelaksana kebijakan dengan memanipulasi insentif. Pada dasarnya orang bergerak berdasarkan dirinya sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana menjalankan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk memenuhi kepentingan pribadi atau organisasi. Di SMP N 2 Jepon pegawai yang bagus dalam pembelajarannya mendapatkan

reward berupa sanjungan dan penambahan kuota belajar.

4) Struktur Birokrasi

Struktur Organisasi pada SMP N 2 Jepon Kota Blora menggambarkan dengan jelas pemisahan kegiatan pekerjaan antara yang satu dengan yang lain dan bagaimana hubungan aktivitas dan fungsi dibatasi. Dalam struktur organisasi ini pola koordinasi yang terjalin menempatkan Kepala sekolah sebagai pejabat tertinggi dimana setiap bagian-bagian organisasi terhubung dengan rantai komando langsung ke Kepala Sekolah. Di SMP N 2 Jepon telah memiliki SOP dalam pelaksanaan pembelajaran pada masa pandemi COVID-19 ini. Selain itu bapak ibu guru mengalami piiket pagi dalam menyongsong peserta didik masuk ke sekolah.

Proses Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran Jarak Jauh Selama Pandemi Covid-19 di SMP N 2 Jepon. Berdasarkan hasil temuan yang diperoleh proses pelaksanaan pembelajaran jarak jauh dilakukan dengan cara guru menyampaikan materi terlebih dahulu dan dishare menggunakan aplikasi penunjang seperti wa grup dengan menggunakan voice note, mencatatkan materi dan mengirimkan video materi pembelajaran yang akan diajarkan. Guru tidak hanya langsung memberi penugasan kepada siswa. Hal ini seperti yang dijelaskan Nindiati (2020:17) sebelum memberikan penugasan kepada siswa melalui internet, pendidik diharuskan menyampaikan materi yang telah disiapkan. Dengan demikian, penyampaian materi terlebih dahulu sebelum memberikan penugasan akan

tetap menjaga interaksi antara guru dengan siswa dalam kegiatan pembelajaran jarak jauh yang nantinya semangat siswa dalam belajar secara daring tetap terjaga seperti halnya ketika belajar di sekolah karena tidak hanya menerima tugas tetapi tetap ada interaksi dengan guru.

Prinsip kebijakan pendidikan di masa pandemi COVID-19 adalah kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan, keluarga dan masyarakat merupakan prioritas utama dalam menetapkan kebijakan pembelajaran. Tumbuh kembang peserta didik dan kondisi psikososial juga menjadi pertimbangan dalam pemenuhan layanan pendidikan selama masa pandemi COVID-19.

Hasil pembelajaran jarak jauh di SMP N 2 Jepon, anak mendapatkan pendidikan meliputi pengetahuan (kognitif) dan keterampilan (psikomotorik). Aspek kognitif peserta didik di SMP N 2 Jepon dilaksanakan dengan cara: klasikal dalam mengajar, memberikan motivasi kepada siswa sebelum mulai pembelajaran, menyampaikan materi dengan memakai metode ceramah dan tanya jawab, memakai media internet, memakai bahan pengajaran dari buku pelajaran dan LKS, memberikan tugas (evaluasi) kepada peserta didik. Aspek Psikomotorik peserta didik melakukan percobaan secara sederhana meliputi pengamatan tingkah laku dalam pengamatan ilmiah dan keterampilan dalam praktikum.

Kegiatan peserta didik untuk mengumpulkan tugas dari guru hanya mencapai 60 %. Berbagai macam alasan dari peserta didik jika di tanya

bapak ibu guru, karena pembelajaran daring ini jauh dari kendali guru dan orang tua. Anak-anak banyak yang tertarik permainan game, bahkan bantuan kuota dari pemerintah di salah gunakan untuk yang lain. Meskipun dari sekolah sudah diberikan motivasi belajar, kegiatan yang menyenangkan, pelajaran yang menantang dan menyusun kegiatan sesuai rencana, tetapi peserta timbul perasaan jenuh dalam pembelajaran.

Hal tersebut sebagian sesuai dengan penelitian Sari et al, (2020:8) Pelaksanaan pembelajaran secara daring tentunya akan memerlukan komunikasi antara siswa, orang tua dan sekolah dikarenakan terkendala jarak yang jauh dan tidak memungkinkan antara siswa dengan sekolah untuk bertemu secara langsung, sedangkan antara orang tua dengan sekolah lebih banyak berkonsultasi, diskusi serta sharing mengenai perkembangan belajar anak selama pembelajaran jarak jauh ini.

Faktor Pedukung Implementasi Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blora Nomor 443.2/1156 tahun 2020 tentang Layanan Penyelenggaraan Pendidikan Dalam Rangka Pencegahan Penularan dan Penyebaran Infeksi Covid-19 di Jawa Tengah pada SMP Negeri 2 Jepon

Pelaksanaan pembelajaran jarak jauh tentunya tidak senyaman dengan pembelajaran tatap muka seperti biasa. Guru harus melakukan penyesuaian –penyesuaian terhadap kondisi baru dilapangan. Dengan kondisi baru ini guru harus tetap melaksanakan kewajiban melakukan proses pembelajaran. Ada beberapa faktor yang mendukung pembelajaran

jarak jauh sehingga masih terlaksana sampai sekarang.

1. Komitmen Kuat Para guru dan Kepala Sekolah

Komitmen ini sangat penting bagi keberlangsungan pembelajaran jarak jauh di SMP N 2 Jepon. Komitmen untuk tetap mematuhi peraturan pemerintah dan komitmen untuk tetap mengajar para siswa bagaimanapun caranya di tengah pandemi COVID-19. Tak jarang para guru berputus asa dan muncul keinginan untuk melanggar aturan pemerintah dengan melaksanakan pembelajaran tatap muka. Kepala sekolah tidak bosan – bosan selalu memberikan motivasi bagi para guru untuk tetap mematuhi aturan pemerintah dan selalubersama-sama guru melakukan evaluasi-evaluasi pembelajaran jarak jauh. Tak jarang kepala sekolah selalu mengingatkan komitmen para guru sebagai pendidik. Guru harus selalu berkomunikasi dan berkoordinasi dengan kepala sekolah mengenai langkah-langkah atau kebijakan yang akan diterapkan pada pembelajaran jarak jauh. Hal ini sesuai dengan buku pedoman pembelajaran jarak jauh yang dikeluarkan KEMDIKBUD yang menyatakan bahwa guru harus selaras dengan kepala sekolah dan mengikuti arahan atau pedoman resmi dari kepala sekolah

Dengan demikian harus ada kesepakatan antara guru dan kepala sekolah tentang apa dan bagaimana pembelajaran jarak jauh ini diterapkan kepada para siswa.

2. Kerjasama orang tua/wali murid Pembelajaran jarak jauh di SMP N 2 Jepon tidak akan terlaksana tanpa adanya kerjasama dan komunikasi

yang baik dengan orang tua/wali murid. Kerjasama antara guru dan wali murid merupakan jembatan terlaksananya kegiatan pembelajaran jarak jauh. Kerjasama untuk bersama – sama membimbing dan mendampingi anaknya ketika belajar dan mengerjakan tugas dari guru serta memantau perkembangan siswa saat di rumah. Ditengah kesibukan mereka sebagai petani persil, mereka bersedia meluangkan waktu untuk bolak – balik dari rumah ke sekolah untuk sekedar mengambil tugas dan menyerahkan kembali ke sekolah.

Peran orang tua menjadi sangat vital dalam pelaksanaan pembelajaran jarak jauh di SMP N 2 Jepon. Hal ini senada dengan Sari et al (2020) yang menyatakan bahwa pelaksanaan pembelajaran secara daring tentunya akan memerlukan komunikasi antara siswa, orang tua dan sekolah dikarenakan terkendala jarak yang jauh dan tidak memungkinkan antara siswa dengan sekolah untuk bertemu secara langsung.

3. Dukungan pemerintah

Berbagai kebijakan dikeluarkan pemerintah untuk mendukung pelaksanaan pembelajaran jarak jauh. Salah satu kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dalam hal ini adalah Kemendikbud adalah dengan memberikan kuota belajar gratis kepada para siswa mulai dari bulan Oktober sampai Desember.

Kuota belajar ini sangat meringankan beban orang tua dalam penyediaan kuota internet yang bisa digunakan untuk beberapa aplikasi seperti zoom, dan whatsapp. Akan tetapi tidak bisa digunakan untuk download dan melihat youtube.

Faktor Penghambat Implementasi Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blora Nomor 443.2/1156 tahun 2020 tentang Layanan Penyelenggaraan Pendidikan Dalam Rangka Pencegahan Penularan dan Penyebaran Infeksi COVID-19 di Jawa Tengah pada SMP Negeri 2 Jepon. Pada tahap pelaksanaan, juga terdapat kendala yang menghambat jalanya pembelajaran jarak jauh di SMP N 2 Jepon. Kendala yang dialami antara lain:

a. Kuota internet

Penggunaan kuota internet merupakan hal yang tidak bisa dielakan dari pembelajaran jarak jauh. penggunaan kuota internet membuat orang tua yang terdampak dalam ekonominya akan merasa terbebani dengan penggunaan kuota internet yang bertambah. Hal inisesuai dengan penelitian Purwanto yang menyatakan adanya peningkatan biaya pada pembelian kuota internet, teknologi online juga harus menggunakan koneksi jaringan ke internet karena tingkat penggunaan kuota internet dapat meningkat serta dapat menjadi beban tambahan bagi orang tua (Purwanto et al., 2020). Dengan demikian melakukan pembelajaran jarak jauh selama beberapa bulan tentunya akan memerlukan kuota internet yang tidak sedikit dan secara langsung dapat meningkatkan pengeluaran biaya pada pembelian kuota internet

b. Kendala signal

Hambatan lain terkait pembelajaran jarak jauh di SMP N 2 Jepon adalah sulitnya signal. Hal ini dikarenakan letak geografis yang berada di pegunungan. Hanya ada

satu dua provider yang bisa menangkap signal di daerah tersebut. Itu pun juga tidak terlalu baik. ketersediaan sarana (handphone/laptop) akan menjadi sia-sia tanpa disertai dengan ketersediaan signal yang memadai. signal menjadi hal vital yang harus terpenuhi agar pembelajaran bisa berjalan lancar.

c. Siswa merasa bosan

Tidak bisa dipungkiri pelaksanaan pembelajaran jarakjauh di SMP N 2 Jepon cenderung monoton. Hanya berkuat pada pemberian tugas oleh guru kepada siswa. Hal ini lama kelamaan membuat siswa menjadi jenuh dan timbul rasa bosan. Siswa tidak bisa berinteraksi dengna guru maupun teman-temanya seperti pada pembelajaran tatap muka. Kondisi ini tentunya belum bisa diterima dengan baik oleh para siswa yang sudah terbiasa dengan suasana pembelajaran tatap muka yang lebih menyenangkan.

Kondisi peserta didik seperti uraian di atas sesuai dengan pernyataan Lestari & Gunawan yang menyebutkan bahwa pada pelaksanaan pembelajaran jarak jauh ini, siswa masih terbiasa dengan sistem pembelajaran tatap muka langsung bersama guru, terbiasa belajar bersama teman-teman sambil bermain (Lestari & Gunawan, 2020)

Upaya SMP N 2 Jepon dalam mengoptimalkan Implementasi Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blora Nomor 443.2/1156 tahun 2020 tentang Layanan Penyelenggaraan Pendidikan Dalam Rangka Pencegahan Penularan dan Penyebaran Infeksi COVID-19 di

Jawa Tengah pada SMP Negeri 2 Jepon

Pembelajaran jarak jauh memerlukan sosialisasi kepada masyarakat dan pentingnya suatu pendekatan yang berbeda dalam hal perencanaan, perancangan, penyampaian kursus dan komunikasi. Peserta membutuhkan motivasi diri untuk memulai dan mengembangkan persistensi dan keahlian-keahlian dalam tugas yang bersifat mandiri (*self-directing work*). Instruktur akan mengembangkan dan menggunakan metodologi-metodologi dan gaya-gaya pembelajaran baru, mulai dari instruksi langsung hingga mengelola strategi-strategi pembelajaran, memberi dukungan terhadap peserta didik, memfasilitasi perdebatan jarak jauh, serta mendiseminasi informasi dan pandangan-pandangan.

Sekolah mengatasi kendala dalam pelaksanaan pembelajaran jarak jauh dengan cara guru selalu memberikan motivasi-motivasi kepada para siswa dengan cara berinteraksi melalui video call serta memberikan motivasi dengan voice note agar semangat belajar siswa tetap terjaga dan membuat modifikasi model belajar selama kegiatan pembelajaran jarak jauh dengan cara sharing serta mencari ide ide kreatif antar sesama guru. Pernyataan tersebut sebagian sesuai dengan penelitian Lestari & Gunawan, (2020:62) mengungkapkan guru menjadi semakin inovatif dalam mengemas bahan, semakin kreatif mengembangkan metode pembelajaran untuk menarik antusiasme dari siswa. Dapat disimpulkan bahwa guru tetap dapat memaksimalkan proses kegiatan pembelajaran dengan memberikan

motivasi kepada siswa melalui video call dan menjadi lebih inovatif ketika membuat bahan ajar dengan tujuan mendapatkan antusiasime dari siswa.

Penutup

Implementasi Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blora Nomor 443.2/1156 tahun 2020 tentang Layanan Penyelenggaraan Pendidikan Dalam Rangka Pencegahan Penularan dan Penyebaran Infeksi COVID-19 di Jawa Tengah pada SMP Negeri 2 Jepon belum berjalan secara optimal, karena masih terdapat beberapa hak-hak anak yang tidak terpenuhi. Disamping itu, berdasarkan indikator implementasi masih terdapat beberapa kendala, yaitu dari sisi komunikasi, proses komunikasi yang terjadi dalam implementasi kebijakan tersebut belum berjalan dengan baik, terutama tentang keadaan geografis, kuota internet dan kemampuan peserta didik. Hambatan Implementasi Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blora Nomor 443.2/1156 tahun 2020 di SMP Negeri 2 Jepon terutama tentang kuota internet, terkendala signal dan siswa merasa bosan sehingga menyebabkan kebijakan yang terealisasi masih belum optimal. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan Implementasi Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blora Nomor 443.2/1156 tahun 2020 pada SMP Negeri 2 Jepon yaitu mengadakan sosialisasi tentang kebijakan pemerintah kepada masyarakat, memberikan motivasi-motivasi kepada para siswa, membuat pembelajaran yang bervariasi dan

pemberian kuota internet dari pemerintah.

Daftar Pustaka

- Aan Komariah, Djam'an Satori, 2011, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung, Alfabeta.
- Abdul Wahab Solihin, *Analisa Kebijakan : Dari Formulasi ke Implementasi* (Jakarta : Rineka Cipta, 2004).
- Dadang Sufianto, 2015, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, Bandung: Cv Pustaka Setia
- Depdiknas .2003. *Undang-undang RI No.20 tahun 2003*.tentang sistem pendidikan nasional.
- Edwards III, George C. 2003. *Implementing Public Policy*.Jakarta
- International Council on Archives, "http://www.ica-sae.org/," 20 December 2005. [Online]. Available: <http://www.ica-sae.org/trainer/indonesian/p11.htm>
- Kor, H., Aksoy, H., & Eerbay, H. (2014). *Comparison of the Proficiency Level of the Course Materials (Animations, Videos, Simulations, E-Books) Used In Distance Education. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 141, 854–860*. Retrieved from <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.05.150> Jurnal Nominal/Volume III Nomor 1.

- Lenar, S., Artur, F., Ullubi, S., & Nailya, B. (2014). *Problems And Decision In The Field Of Distance Education*. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 131, 111–117. Retrieved from <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.04.088>
- Lestari, P. A. S., & Gunawan. (2020). The Impact of Covid-19 Pandemic on Learning Implementation of Primary and Secondary School Levels. *Indonesian Journal of Elementary and Childhood Education*, 1 (2), 58–63.
- Moleong, Lexy J. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Moore, M. dan Kearsley, G. 2005. *Distance Education: A Systems View*. Second Edition. USA: Thomson Wadsworth
- Nindiati, D. S. (2020). *Pengelolaan Pembelajaran Jarak Jauh yang Memandirikan Siswa dan Implikasinya Pada Pelayanan Pendidikan*. *Journal of Education and Instruction*, 3 (1)(2614-8617 2620-7346), 14–20.
- Permendikbud (2014) No 119 tahun 2014 tentang *Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh pada jenjang pendidikan dasar dan menengah*
- Peraturan Pemerintah (PP) (2010) Nomor 17 Tahun 2010 tentang *Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan*
- Purwanto, A., Pramono, R., Asbari, M., Priyono Budi Santoso, L. M. W., Hyun, C. C., & Putri, R. S. (2020). *Studi Eksploratif Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Proses Pembelajaran Online di Sekolah Dasar*. *Journal Education Psychology and Counseling*, 2 (1), 1–12
- Sari, W., Rifki, A. M., & Karmila, M. (2020). *Analisis Kebijakan Pendidikan Terkait Implementasi Pembelajaran Jarak Jauh Pada Masa Darurat Covid 19*.
- Setijadi (ed). (2005). *Pedoman Pendidikan Jarak Jauh*. Universitas Terbuka Departemen Pendidikan Nasional. Jakarta.
- Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B*. Bandung: Alfabeta.
- Surat Edaran Kemendikbud Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran Covid-19*.
- Suwardi. 2016 *Metode pemetaan politik untuk pemilihan umum kepala daerah pilkada kota salatiga 2017*. Surkakarta: Transformasi.

- Varshneya, A. K. (2017). *Distance Learning through ICT: Benefits and Challenges*. ADR Journals, 7–9.
- Wahab, Solichin Abdul. 2005. *Analisis Kebijakan Edisi Kedua Dari Fomulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta : PT Bumi Aksara.
- Waluyo, 2007, *Perpajakan Indonesia, Buku 1 Edisi 7*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Wanda Aprilla, *Kebijakan Pembelajaran Jarak Jauh Mengenai Keberhasilan dan Dampak Terhadap Peserta Didik*, FKIP Universitas Lambung Mangkurat wanda.aprilla181012@gmail.com
- Wilder-Smith, A., & Freedman, D. O. (2020). *Isolation, quarantine, social distancing and community containment: pivotal role for old-style public health measures in the novel coronavirus (2019-nCoV) outbreak*. Journal of Travel Medicine, 1–4.
- Winarno, Budi. 2008. *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Jakarta: PT Buku Kita